

Judul : Ombudsman Yang Adil, Kok Soroti Betul Tanah Abang
Tanggal : Rabu, 28 Maret 2018
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 19

Ombudsman Yang Adil, Kok Soroti Betul Tanah Abang

OMBUDSMAN getol mengkritisi kebijakan penataan Tanah Abang, Jakarta Pusat yang dilakukan Gubernur dan Wakil Gubernur Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Setelah kawasan Tanah Abang ditata 22 Desember lalu, Ombudsman beberapa kali meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menganulir kebijakan penutupan Jalan Jatibaru Raya untuk PKL. Teranyar, Anies diberi tenggat waktu. Kalau rekomendasi tak dijalankan juga, sesuai aturan, Anies bisa dinonjobkan.

Melihat hal itu, Wakil Ketua DPR Muhammad Taufik mengkritik keras Ombudsman yang tak adil dalam memberi rekomendasi.

Politikus Partai Gerindra ini heran Ombudsman hanya menyoroti kebijakan penataan

Tanah Abang yang menempatkan PKL di Jalan Jatibaru. Padahal, penutupan jalan juga terjadi di tempat lain sewaktu masa kepemimpinan gubernur-gubernur sebelumnya.

"Ombudsman yang adil. Kan bukan hanya ini. Kesannya kok menyoroti betul soal Tanah Abang," kata Taufik saat berbincang.

Taufik mengingatkan, penutupan jalan tidak hanya terjadi di Jalan Jatibaru, Tanah Abang. Penutupan juga pernah terjadi di jalan lainnya seperti di sebelah bekas Kedutaan Inggris di sekitar Bundaran HI. Penutupan jalan juga terjadi di samping Kedutaan Amerika. Malahan, penutupan dilakukan secara permanen.

Taufik melihat, kebijakan menutup Jalan Jatibaru dilaku-

kan untuk mengakomodir kepentingan yang lebih besar, yakni penataan PKL. Selain itu, ini penutupan hanya sementara.

"Ini kan sementara, penataan sementara yang suatu saat saya kira akan ketemu yang permanen seperti apa. Mereka 15 tahun loh PKL itu, 15 tahun dikejar-kejar," ingatnya.

Soal 'ancaman' Ombudsman, Taufik yakin, kebijakan penataan Tanah Abang, Jakarta Pusat, tak akan sampai membuat Anies Baswedan dinonjobkan.

"Enggak lah. Kalo saya bilang interpelasi kan DPRD dong, enggak itu. Ini kebijakan untuk wong cilik kok," kata Taufik.

Menanggapi ini, Anies mengaku ingin membaca laporannya utuh terlebih dahulu sebelum memberi respons secara lengkap.

"Saya sampaikan kan kalau

kami menghormati, kami baca laporannya baru merespons. Itu cara menghormati. Kalau kami merespons tanpa membaca itu namanya enggak menghargai," ujar Anies.

Anies berkilah, laporan yang dibuat Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya begitu panjang. Dia tidak ingin hanya melihat kesimpulan saja. Bekas Menteri Pendidikan ini berterima kasih atas keterlibatan Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya dalam kebijakan Pemprov DKI Jakarta.

Meski demikian, dia mengingatkan, laporan kebijakan Tanah Abang datang dari Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya, bukan dari Ombudsman RI yang ada di tatanan pusat.

"Karena itu ada dua hal berbeda. Ini adalah perwakilan,

yang memiliki otoritas siapa? Ombudsman (Pusat). Ini adalah perwakilan DKI," tambahnya.

Anies mengaku akan mempelajari lebih lanjut seluruh malaadministrasi berdasarkan kajian Ombudsman tanpa mengurangi rasa hormat. Dia juga tak memasang tenggat waktu sampai kapan pihaknya tetap akan melaksanakan penataan kawasan Tanah Abang dengan menutup Jalan Jatibaru Raya.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menyesalkan keterangan resmi tentang malaadministrasi penataan kawasan Tanah Abang yang disebar Ombudsman tanpa melibatkan Pemprov DKI.

"Sebetulnya alangkah baiknya kalau didiskusikan dulu dengan kita. Lalu kita bisa rilis bersama," tandasnya. ■ FAQ